

SIGMA: DIGITALISASI SOP PENGGELEDAHAN PENGUNJUNG DI LAPAS KELAS IIA BINJAI

Rihando Ginting¹, Naniek Pangestuti²

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

Email : gintingando2004@gmail.com

ABSTRAK

Penggeledahan badan dan barang bawaan pengunjung merupakan pengendalian preventif yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Hasil observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai menunjukkan kebutuhan terhadap prosedur penggeledahan yang lebih sistematis, mudah diakses, diterapkan secara seragam, serta didukung informasi yang jelas bagi petugas dan pengunjung. Kegiatan pengabdian ini mengembangkan SIGMA (Sistem Informasi Penggeledahan dan Monitoring Barang) melalui digitalisasi Standar Operasional Prosedur penggeledahan badan dan barang bawaan pengunjung. Kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif melalui observasi alur layanan kunjungan, identifikasi kebutuhan, penyusunan SOP dan bagan alur, konsultasi dan validasi bersama petugas, sosialisasi, pendampingan penerapan, serta evaluasi deskriptif. Luaran program meliputi SOP yang disempurnakan, bagan alur pemeriksaan, media informasi mengenai tahapan pemeriksaan dan ketentuan barang bawaan, serta mekanisme akses digital terhadap prosedur. Enam target luaran dapat diselesaikan. Persentase penyelesaian tersebut menunjukkan ketercapaian luaran, bukan ukuran kausal efektivitas keamanan jangka panjang. SIGMA memberikan nilai praktis berupa kejelasan prosedur, dukungan terhadap konsistensi petugas, penguatan dokumentasi, dan peningkatan pemahaman pengunjung. Keberlanjutan program memerlukan pembaruan berkala, pengelolaan akses, evaluasi rutin, dan keterlibatan aktif petugas. **Kata Kunci** : Keamanan Pemasyarakatan; Penggeledahan; Pelayanan Kunjungan; SIGMA; SOP Digital

ABSTRACT

Body and personal-belonging searches of visitors are crucial preventive controls for maintaining security and order in correctional institutions. At Class IIA Binjai Correctional Institution, field observations identified a need for a more systematic, accessible, and consistently applied search procedure, supported by clearer information for officers and visitors. This community service program developed SIGMA (Search and Goods Monitoring Information System) by digitizing the standard operating procedure for visitor body and belongings searches. The activity used a participatory descriptive approach involving observation of visit-service workflows, identification of operational needs, procedure and process-flow preparation,

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism Checker No

234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

consultation and validation with officers, socialization, implementation support, and descriptive evaluation. The outputs comprised a validated search procedure, a visual process flow, information media on inspection stages and permitted or prohibited items, and a digital access mechanism. All six planned output targets were completed. This completion rate represents output achievement rather than a long-term causal measure of security effectiveness. SIGMA improves procedural clarity, supports consistency, strengthens documentation, and helps visitors understand inspection requirements. Sustainable use requires routine updating, responsible access management, periodic evaluation, and continued officer involvement.

Keywords: Correctional Security; Digital Procedure; Search; SIGMA; Visitor Service

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemasyarakatan menempatkan keamanan, ketertiban, pembinaan, dan pemenuhan hak sebagai unsur yang saling mendukung. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pengamanan mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban. Layanan kunjungan merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mempertahankan hubungan sosial dengan keluarga. Namun, layanan tersebut juga menjadi titik kendali yang memerlukan pemeriksaan secara cermat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Layanan kunjungan mempertemukan kebutuhan pelayanan publik dengan kewajiban pengamanan. Pengunjung datang dengan latar belakang, kebutuhan, dan jenis barang bawaan yang beragam. Petugas harus memastikan bahwa seluruh orang dan barang yang memasuki area Lapas memenuhi ketentuan. Kegagalan mendeteksi narkoba, alat komunikasi ilegal, senjata, uang yang tidak sesuai ketentuan, maupun benda lain yang berpotensi disalahgunakan dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan. Peredaran barang terlarang dalam penjara dipengaruhi oleh karakteristik lembaga, populasi, dan mekanisme pengawasan. Strategi pencegahan karena itu perlu disesuaikan dengan kondisi operasional masing-masing satuan kerja (Peterson et al., 2024).

Studi mengenai keamanan pemasyarakatan di Indonesia menekankan pentingnya deteksi dini, pengeledahan rutin, koordinasi, pengawasan, dan kecukupan sumber daya. Fikia dan Subroto (2023) menempatkan pengeledahan dan kontrol pada titik rawan sebagai unsur strategi pencegahan gangguan keamanan. Aji et al. (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan personel dan sarana dapat memengaruhi ketelitian pemeriksaan fisik maupun barang bawaan pengunjung. Kualitas pengeledahan bergantung pada perpaduan kompetensi petugas, prosedur baku, sarana pendukung, dan pengawasan berkesinambungan.

Petugas Pintu Utama memiliki posisi strategis sebagai lapisan awal pengawasan keluar-masuk orang dan barang. Kurniawan (2023) menjelaskan bahwa fungsi tersebut berkaitan langsung dengan pencegahan penyelundupan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti, teratur, dan konsisten. Asror et al. (2024) menambahkan pentingnya pengumpulan informasi,

deteksi dini, koordinasi, dan tindak lanjut terhadap potensi gangguan. SOP penggeledahan seharusnya menjadi instrumen operasional yang menghubungkan pemeriksaan, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi.

Prosedur yang tidak terdokumentasi secara rinci dapat menimbulkan variasi pelaksanaan antartugas. Perbedaan urutan pemeriksaan, cara menyampaikan informasi, pencatatan temuan, dan tindak lanjut terhadap barang yang tidak diperbolehkan dapat mengurangi kepastian layanan. Penyusunan SOP dibutuhkan untuk memperjelas siapa melakukan apa, kapan tindakan dilakukan, dokumen apa yang digunakan, dan bagaimana hasil pemeriksaan dilaporkan. Penyusunan SOP pada unit pelayanan publik dapat menciptakan kepastian alur, waktu, kelengkapan, dan dasar pelaksanaan bagi pegawai (Dalaiya dan Musdalifah, 2023).

Digitalisasi dapat meningkatkan fungsi praktis SOP. Dokumen digital lebih mudah diperbarui, didistribusikan, dan diakses dibandingkan dokumen cetak yang tersimpan pada lokasi terbatas. Transformasi digital pemerintah perlu diarahkan pada kemampuan organisasi memberikan layanan bernilai, responsif, dan berkelanjutan (Eom dan Lee, 2022). Perubahan digital di sektor publik juga menyangkut proses, peran, kapasitas, koordinasi, dan tata kelola (Haug et al., 2024). Digitalisasi SOP karena itu harus berangkat dari kebutuhan pengguna dan kondisi kerja nyata, bukan sekadar memindahkan dokumen dari bentuk kertas ke layar.

Kejelasan informasi berpengaruh terhadap penerimaan layanan digital. Penjelasan yang mudah dipahami dapat meningkatkan persepsi kegunaan, kepercayaan, dan penggunaan layanan publik elektronik (Fahr et al., 2025). Prinsip tersebut relevan bagi SIGMA karena prosedur penggeledahan digunakan oleh petugas sebagai pelaksana dan dipahami pengunjung sebagai penerima layanan. Informasi mengenai tahapan pemeriksaan, hak dan kewajiban, serta barang yang diperbolehkan atau dilarang perlu disampaikan dengan bahasa sederhana, visual yang jelas, dan akses yang mudah.

Selama KKN di Lapas Kelas IIA Binjai, taruna mengamati pemeriksaan identitas, penggeledahan badan, pemeriksaan barang bawaan, registrasi, dan pengawasan lalu lintas orang serta barang. Observasi dan koordinasi menunjukkan bahwa informasi prosedur dan ketentuan barang bawaan masih banyak disampaikan secara lisan. SOP lokal belum terdokumentasi secara sistematis dan mudah diakses. Alur pemeriksaan belum divisualisasikan secara ringkas, sedangkan media informasi untuk pengunjung masih perlu diperkuat.

Kondisi tersebut dapat membuat petugas baru atau petugas pengganti memerlukan waktu lebih lama untuk memahami urutan kerja. Pengunjung juga dapat membawa barang yang tidak sesuai ketentuan karena kurang memperoleh informasi sebelum pemeriksaan. Penjelasan berulang secara lisan berpotensi memperlambat pelayanan dan menimbulkan perbedaan interpretasi. Evaluasi menjadi lebih sulit apabila prosedur, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut tidak didukung pedoman serta dokumentasi yang konsisten.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, dikembangkan SIGMA. Istilah sistem informasi dalam program ini tidak merujuk pada aplikasi berskala besar yang menggantikan keseluruhan proses layanan. SIGMA merupakan rangkaian SOP, bagan alur, media informasi, dan akses digital yang mendukung petugas melaksanakan serta memantau penggeledahan. Pilihan ini mempertimbangkan keterbatasan waktu KKN, kebutuhan biaya yang rendah, kemudahan penerapan, dan peluang keberlanjutan setelah program berakhir.

Inovasi sejenis telah dilaporkan dalam beberapa konteks pemasyarakatan. Salsabilla dan Subroto (2025) menekankan peran electronic standard operating procedure dalam penguatan habituasi petugas keamanan. Kusuma (2025), Ngongo et al. (2025), dan Rifaldo (2025) menunjukkan bahwa inovasi sederhana pada layanan kunjungan dapat memperjelas alur, meningkatkan ketertiban pemeriksaan, dan mendukung keamanan. Frasetyo et al. (2025) juga menunjukkan bahwa sosialisasi layanan kunjungan penting untuk meningkatkan pemahaman pengguna layanan.

Kajian yang secara khusus memadukan SOP penggeledahan badan, pemeriksaan barang bawaan, media edukasi pengunjung, bagan alur, dan akses digital dalam satu paket inovasi pada Lapas Kelas IIA Binjai masih terbatas. Program ini bertujuan menyusun SOP yang sistematis, menghasilkan bagan alur, menyediakan media informasi, mendukung keseragaman dan dokumentasi, serta menyiapkan inovasi yang dapat diperbarui secara berkelanjutan.

Tabel 1. Pemetaan Masalah, Dampak, dan Respons Program SIGMA

No.	Masalah Awal	Dampak Potensial	Respons SIGMA
1	SOP lokal belum terdokumentasi rinci	Variasi tahapan dan ketergantungan pada kebiasaan	SOP berisi pelaksana, urutankerja, keputusan, dan tindak lanjut.
2	Informasi dominan disampaikan lisan	Perbedaan pemahaman dan penjelasan berulang	Media informasi ringkas, visual, dan mudah diakses.
3	Daftar barang belum tersaji jelas	Barang tidak sesuai ketentuan dibawa ke titik pemeriksaan	Infografik ketentuan barang bawaan.
4	Alur pemeriksaan belum divisualisasikan	Petugas dan pengunjung sulit memperoleh gambaran proses	Bagan alur pemeriksaan dan tindakan terhadap temuan.
5	Monitoring dan pembaruan belum terstruktur	Evaluasi dan penyesuaian prosedur menjadi lambat	Akses digital, dokumentasi, dan rencana evaluasi berkala.

METODE PENELITIAN

Kegiatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai pada 19 Juni sampai dengan 08 Agustus 2026. Sasaran utama program adalah petugas yang terlibat dalam layanan kunjungan dan pengamanan, terutama petugas pemeriksaan identitas, penggeledahan badan, pemeriksaan barang bawaan, pencatatan, dan pengawasan pintu masuk. Pengunjung ditempatkan sebagai penerima manfaat tidak langsung melalui penyediaan informasi yang lebih jelas.

Pendekatan kegiatan bersifat deskriptif partisipatif. Partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan petugas pada tahap identifikasi kebutuhan, klarifikasi alur kerja, penelaahan rancangan, pemberian masukan, dan penyempurnaan produk. Pendekatan ini menjaga agar SOP sesuai dengan tata kerja, kewenangan, sarana, dan pola layanan yang berlangsung di lokasi.

Model tersebut sejalan dengan prinsip transformasi digital sektor publik yang menempatkan pengguna, proses organisasi, dan kapasitas implementasi sebagai unsur utama (Haug et al., 2024).

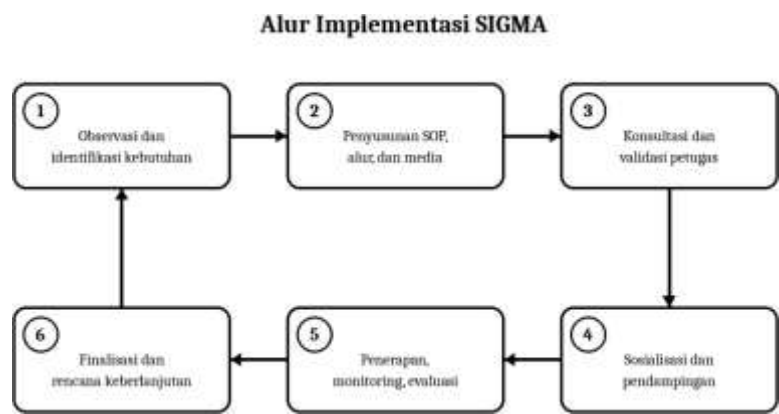
Sumber data kegiatan terdiri atas observasi langsung terhadap alur layanan, koordinasi dan konsultasi dengan petugas, dokumen internal serta ketentuan masyarakatan yang relevan, dokumentasi tahapan kegiatan, dan literatur jurnal. Data laporan KKN digunakan untuk menggambarkan masalah, tahapan program, target luaran, kendala, dan capaian.

Instrumen kegiatan meliputi lembar catatan observasi, matriks identifikasi masalah, daftar periksa substansi SOP, matriks konsultasi dan perbaikan, lembar ketercapaian target, serta dokumentasi foto. Instrumen digunakan secara deskriptif. Kegiatan tidak melakukan eksperimen, pengambilan sampel statistik, atau pengukuran kausal terhadap penurunan barang terlarang. Hasil program dinilai dari kelengkapan luaran, kesesuaian dengan kebutuhan lapangan, keterbacaan prosedur, dan respons perbaikan petugas.

Analisis data dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, data hasil observasi dan diskusi direduksi menjadi masalah inti, kebutuhan, dan keputusan prosedural. Kedua, informasi disajikan dalam matriks, urutan kerja, bagan alur, dan rancangan media. Ketiga, rancangan dibandingkan dengan kondisi operasional serta ditelaah bersama petugas. Keabsahan praktis diperkuat melalui triangulasi sederhana antara observasi, penjelasan petugas, dokumen, dan hasil konsultasi.

Pelaksanaan program dibagi menjadi enam tahap. Tahap pertama adalah observasi dan identifikasi kebutuhan. Tahap kedua adalah koordinasi dan pengumpulan informasi untuk memetakan pelaksana, keputusan, kebutuhan media, dan hambatan. Tahap ketiga adalah penyusunan rancangan SOP, bagan alur, dan media informasi. Tahap keempat adalah konsultasi dan penyempurnaan. Tahap kelima adalah sosialisasi dan pendampingan awal. Tahap keenam adalah monitoring, evaluasi deskriptif, dan finalisasi produk.

Kriteria keberhasilan ditetapkan pada enam target luaran, yaitu identifikasi kondisi penggeledahan, tersusunnya SOP, tersusunnya bagan alur, tersedianya media informasi, terlaksananya konsultasi dan penyempurnaan, serta terselesaikannya produk akhir SIGMA. Ketercapaian dihitung dengan rumus jumlah target terealisasi dibagi jumlah target direncanakan dikalikan 100 persen. Perhitungan tersebut hanya merepresentasikan penyelesaian luaran program, bukan efektivitas keamanan jangka panjang.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program SIGMA

Tabel 2. Tahapan, Kegiatan Utama, dan Luaran Program

No.	Tahap	Kegiatan Utama	Luaran
1	Observasi	Mengamati layanan kunjungan, pemeriksaan identitas, barang bawaan, pengeledahan badan, dan tindak lanjut.	Peta kondisi awal dan masalah.
2	Koordinasi	Mengklarifikasi kebutuhan, pembagian tugas, istilah, risiko, dan sarana dengan petugas.	Matriks kebutuhan dan ruang lingkup.
3	Penyusunan	Menyusun SOP, bagan alur, dan media ketentuan barang bawaan.	Draf SOP dan media SIGMA.
4	Konsultasi	Menelaah urutan kerja, kewenangan, bahasa, dan kesesuaian lapangan.	Catatan validasi dan revisi.
5	Sosialisasi	Menjelaskan SOP, bagan alur, akses digital, dan penggunaan media.	Pemahaman awal pengguna.
6	Evaluasi dan finalisasi	Mencatat kendala, memperbaiki isi dan tampilan, serta menyusun tindak lanjut	Produk akhir dan rekomendasi keberlanjutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Pelaksanaan Pengeledahan

Observasi menunjukkan bahwa pengeledahan badan dan barang bawaan telah menjadi bagian tetap dari layanan kunjungan. Pengunjung terlebih dahulu melalui pemeriksaan administrasi dan identitas. Petugas kemudian memeriksa barang bawaan dan melakukan pengeledahan badan sesuai ketentuan. Pengunjung diarahkan menuju area kunjungan apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Petugas memisahkan, menolak, atau menindaklanjuti barang yang tidak diperbolehkan.

Kekuatan kondisi awal terletak pada pengalaman petugas, kepedulian terhadap keamanan, dan praktik pemeriksaan yang telah berjalan. Namun, pengetahuan prosedural lebih banyak berada dalam pengalaman kerja dan komunikasi lisan. Situasi ini kurang ideal ketika terjadi rotasi petugas, peningkatan jumlah pengunjung, perubahan ketentuan, atau kebutuhan menelusuri kembali keputusan. SOP terdokumentasi diperlukan untuk mengubah pengetahuan individual menjadi pengetahuan organisasi. Dari sisi pengunjung, informasi sebelum pemeriksaan belum selalu seragam. Pengunjung memerlukan penjelasan mengenai barang yang boleh dibawa, cara pengemasan, tahapan pemeriksaan, dan tindakan terhadap barang yang ditolak. Tanpa informasi awal, petugas harus menjelaskan kembali pada titik pemeriksaan. Hal tersebut dapat menambah waktu layanan dan meningkatkan potensi kesalahpahaman. Frasetyo et al. (2025) menekankan bahwa sosialisasi layanan kunjungan membantu pengguna memahami prosedur dan mendukung ketertiban layanan. Kondisi tersebut sejalan dengan Aji et al. (2023) yang menempatkan pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan sebagai pekerjaan yang dipengaruhi personel serta sarana. Julia et al. (2025) juga menggarisbawahi bahwa pencegahan peredaran barang terlarang membutuhkan sistem pengamanan yang terencana, pemeriksaan, pengawasan, dan tindak lanjut. SIGMA diarahkan bukan untuk menggantikan kompetensi petugas, melainkan untuk memperkuat konsistensi dan memudahkan akses terhadap pedoman.



Gambar 2. Observasi Pemeriksaan Barang Bawaan pada Layanan Kunjungan

2. Penyusunan SOP Penggeledahan

Luaran utama program adalah SOP penggeledahan badan dan barang bawaan pengunjung. SOP dirancang sebagai pedoman lokal yang menerjemahkan ketentuan umum ke dalam urutan kerja yang dapat diterapkan di Lapas Kelas IIA Binjai. Penyusunan dimulai dengan menetapkan tujuan, ruang lingkup, pihak yang bertanggung jawab, kebutuhan sarana, dan prinsip pelayanan. Alur kemudian diuraikan dari persiapan petugas sampai pelaporan dan evaluasi.

Pada tahap persiapan, petugas memastikan kesiapan area pemeriksaan, alat bantu, media informasi, wadah barang, formulir atau media pencatatan, serta pembagian peran. Pada tahap penerimaan, identitas dan persyaratan kunjungan diverifikasi sebelum pemeriksaan fisik. Pemisahan tahap administrasi dan keamanan membantu mencegah duplikasi serta memperjelas tanggung jawab.

Pemeriksaan barang bawaan disusun dengan urutan konsisten: pengunjung menempatkan barang pada area pemeriksaan, membuka kemasan sesuai arahan, petugas memeriksa setiap jenis barang, membandingkannya dengan ketentuan, memisahkan barang yang tidak diperbolehkan, dan mencatat tindakan. Penggeledahan badan dilakukan oleh petugas berwenang dengan memperhatikan jenis kelamin, kesopanan, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

SOP juga memuat titik keputusan apabila ditemukan barang yang tidak sesuai. Barang dapat dikembalikan kepada pengunjung, dititipkan sesuai mekanisme yang berlaku, ditolak untuk masuk, atau ditindaklanjuti apabila terdapat dugaan pelanggaran. Setiap keputusan harus disesuaikan dengan kewenangan dan ketentuan. Struktur tersebut memperkuat fungsi SOP sebagai alat standardisasi, pelatihan, pengendalian, dan evaluasi (Dalaiya dan Musdalifah, 2023; Salsabilla dan Subroto, 2025).

3. Komponen SIGMA dan Digitalisasi Prosedur

SIGMA terdiri atas empat komponen yang saling melengkapi. Komponen pertama adalah dokumen SOP sebagai sumber prosedur lengkap. Komponen kedua adalah bagan alur untuk membantu petugas melihat urutan dan titik keputusan secara cepat. Komponen ketiga adalah media informasi bagi pengunjung mengenai tahapan pemeriksaan serta barang yang diperbolehkan dan dilarang. Komponen keempat adalah akses digital yang memudahkan penyimpanan, pembaruan, distribusi, dan penggunaan dokumen.

Bagan alur tidak menggantikan SOP. Bagan menyederhanakan bagian yang membutuhkan keputusan cepat, sedangkan penjelasan rinci tetap berada dalam dokumen SOP. Pemisahan ini menghindari SOP yang terlalu panjang dan infografik yang terlalu singkat. Petugas dapat menggunakan bagan sebagai pengingat dan membuka SOP ketika memerlukan penjelasan lebih lengkap.

Media informasi pengunjung disusun dengan bahasa mudah dipahami. Fokusnya adalah tindakan praktis: menyiapkan identitas, mengikuti antrean, membuka barang sesuai arahan, mematuhi penggeledahan, tidak membawa barang terlarang, dan menerima keputusan petugas berdasarkan ketentuan. Akses digital memberikan manfaat berupa akses dokumen pada titik kerja, pengelolaan revisi, dan distribusi bahan sosialisasi secara konsisten.

Digitalisasi juga menimbulkan kebutuhan baru berupa pengelolaan versi, penanggung jawab pembaruan, pengaturan akses, perlindungan informasi, dan salinan cadangan ketika jaringan atau perangkat tidak dapat digunakan. Teknologi perlu disertai perubahan proses, kapasitas, dan tata kelola (Eom dan Lee, 2022; Haug et al., 2024). Keberhasilan SIGMA karena itu dinilai dari keterpakaian, konsistensi, kemampuan diperbarui, dan manfaat bagi pengamanan serta pelayanan, bukan dari kompleksitas aplikasi.



Gambar 3. Dokumentasi Observasi, Koordinasi, Sosialisasi, dan Media SIGMA

4. Media Informasi Pengemasan Barang Bawaan



Gambar 4. Media Informasi Penggeledahan Barang dengan Kemasan Transparan

Media informasi menjelaskan bahwa barang konsumsi dan kebutuhan tertentu perlu dipindahkan dari kemasan pabrik ke plastik transparan agar seluruh bagian barang dapat diamati. Contoh yang ditampilkan meliputi sabun cair, pasta gigi, makanan ringan, lauk-pauk, rokok dalam batas yang ditentukan, mi instan yang telah dihancurkan, dan nasi. Poster juga memberi contoh kemasan pabrik yang tidak diperbolehkan dibawa masuk.

Informasi visual tersebut berfungsi sebagai pencegahan administratif. Pengunjung dapat menyiapkan barang sebelum tiba di meja pemeriksaan sehingga petugas tidak menghabiskan waktu untuk menjelaskan aturan yang sama. Kemasan transparan meningkatkan visibilitas dan mengurangi ruang tersembunyi. Namun, poster tidak menggantikan pemeriksaan fisik. Petugas

tetap memeriksa isi, jumlah, kondisi kemasan, dan kemungkinan manipulasi. Konten media perlu ditinjau berkala agar sesuai dengan regulasi, kebijakan lokal, dan pola risiko yang berkembang.

5. Media SOP Pengelolaan Pengunjung



Gambar 5. Media SOP Pengelolaan Pengunjung dan Pemeriksaan Badan atau Barang

Media SOP pengelolaan pengunjung merangkum tujuh komponen penting, yaitu prosedur pelayanan, bagian tubuh yang diperiksa, jenis barang yang wajib diperiksa, contoh kemasan yang diperiksa, perlakuan khusus terhadap makanan berbentuk tertentu, pemeriksaan oleh petugas berjenis kelamin sama, serta tujuan pengelolaan pengunjung. Susunan tersebut mempertemukan aspek teknis dengan etika pelayanan.

Informasi bahwa pemeriksaan dilakukan secara sopan, profesional, dan menghormati hak asasi manusia perlu dipertahankan sebagai pesan utama. Kepatuhan pengunjung lebih mudah dibangun melalui komunikasi yang jelas dan perlakuan yang bermartabat.

6. Pelaksanaan, Konsultasi, dan Penyempurnaan

Pelaksanaan dimulai dengan pengamatan langsung pada area layanan kunjungan. Temuan lapangan dicatat dan dibandingkan dengan kebutuhan petugas. Setelah rancangan awal dibuat, dilakukan koordinasi dan konsultasi untuk memeriksa istilah, tahapan, serta tindakan yang mungkin dilakukan. Konsultasi penting karena prosedur harus mencerminkan kewenangan, alur ruangan, ketersediaan sarana, dan pola koordinasi yang benar-benar berlaku.

Proses penyempurnaan menghadapi keterbatasan waktu KKN dan kesibukan petugas. Jadwal konsultasi harus menyesuaikan tugas pengamanan. Rancangan juga perlu diperbaiki beberapa kali agar bahasanya tidak terlalu akademik dan tahapan kerjanya tidak ambigu. Kendala diatasi melalui penentuan prioritas, koordinasi sebelum pertemuan, catatan perubahan, dan pemisahan informasi internal petugas dari informasi publik pengunjung.

Sosialisasi memperkenalkan tujuan SIGMA, struktur SOP, penggunaan bagan alur, dan fungsi media informasi. Ditekankan bahwa SIGMA bukan perangkat yang mengurangi kewenangan petugas, melainkan pedoman untuk mendukung tindakan yang lebih seragam. Diskusi juga digunakan untuk mengidentifikasi pembaruan apabila terdapat perubahan daftar barang, tata ruang, mekanisme kunjungan, atau kebijakan pengamanan.



Gambar 6. Sosialisasi Media Informasi SIGMA kepada Pengunjung Layanan Kunjungan

Keterlibatan petugas memperkuat peluang penerimaan program. Inovasi yang disusun tanpa melibatkan pelaksana berisiko tidak sesuai dengan situasi lapangan. Konsultasi memungkinkan bahasa, urutan, dan tampilan disesuaikan dengan cara kerja pengguna. Hal ini sejalan dengan studi layanan publik digital yang menunjukkan pentingnya desain berorientasi pengguna dan penjelasan yang dapat dipahami (Fahr et al., 2025).

7. Ketercapaian Sasaran dan Nilai Tambah Program

Berdasarkan tabel capaian dalam laporan KKN, seluruh enam target luaran dapat direalisasikan. Observasi dan identifikasi kondisi lapangan terlaksana; SOP penggeledahan tersusun; bagan alur dibuat; media informasi tersedia; konsultasi dan penyempurnaan dilakukan; serta produk akhir SIGMA diselesaikan. Ketercapaian luaran adalah 6/6 atau 100 persen. Angka tersebut menunjukkan penyelesaian produk dan proses yang direncanakan, bukan bukti statistik bahwa pelanggaran atau barang terlarang telah berkurang dalam jangka panjang.

Nilai tambah pertama adalah standarisasi. SOP dan bagan alur membantu mengurangi ketergantungan pada pengetahuan lisan serta memberikan rujukan bagi petugas baru, petugas pengganti, dan kegiatan evaluasi. Nilai tambah kedua adalah transparansi layanan. Media informasi membantu pengunjung memahami alasan, tahapan, dan ketentuan pemeriksaan sebelum berada di titik penggeledahan.

Nilai tambah ketiga adalah penguatan dokumentasi dan pembelajaran organisasi. Dokumen digital memungkinkan perbaikan dicatat dan versi terbaru didistribusikan. Nilai tambah keempat adalah efisiensi komunikasi. Informasi visual dapat mengurangi penjelasan berulang, meskipun efisiensi waktu belum diukur secara kuantitatif. Nilai tambah kelima adalah keberlanjutan relatif karena produk dapat digunakan, diperbarui, dan dikembangkan tanpa biaya besar.

Hasil tersebut konsisten dengan inovasi layanan kunjungan pada beberapa Lapas. Kusuma (2025) menunjukkan bahwa perbaikan alur penanganan barang kunjungan dapat mendukung efisiensi dan ketertiban. Ngongo et al. (2025) menekankan manfaat inovasi sarana pemeriksaan untuk kenyamanan dan keamanan. Rifaldo (2025) menggambarkan pentingnya penyesuaian sarana pemeriksaan dengan kebutuhan layanan. Kesamaan utama berbagai inovasi tersebut adalah pemecahan masalah yang konkret, sederhana, dan berorientasi pada proses kerja.

Tabel 3. Ketercapaian Target Program SIGMA

No.	Target	Realisasi	Status
1	Identifikasi pelaksanaan penggeledahan	Observasi dan pemetaan kondisi lapangan dilakukan.	Tercapai
2	Penyusunan SOP penggeledahan	Dokumen SOP penggeledahan badan dan barang bawaan disusun.	Tercapai
3	Penyusunan alur pemeriksaan	Bagan alur pemeriksaan dan tindak lanjut dibuat.	Tercapai
4	Penyediaan media Informasi	Media prosedur dan ketentuan barang bawaan tersedia.	Tercapai
5	Konsultasi dan penyempurnaan	Rancangan ditelaah dan diperbaiki berdasarkan masukan.	Tercapai
6	Produk akhir SIGMA	SOP, bagan alur, media informasi, dan akses digital diselesaikan.	Tercapai

Ketercapaian luaran = $(6 \text{ target terealisasi} / 6 \text{ target direncanakan}) \times 100\% = 100\%$

8. Penguatan Keamanan dan Pelayanan

Dalam perspektif pengamanan, SIGMA memperkuat tahapan pencegahan. Penggeledahan yang terstandar membantu memastikan setiap pemeriksaan mencakup unsur minimum yang sama. Pencatatan dan pelaporan menyediakan dasar untuk evaluasi. Fikia dan Subroto (2023) mengaitkan deteksi dini dengan penggeledahan, kontrol, dan koordinasi. Julia et al. (2025) menekankan bahwa pencegahan barang terlarang memerlukan sistem yang menyatukan petugas, prosedur, sarana, dan pengawasan.

Dalam perspektif pelayanan publik, kejelasan prosedur mengurangi ketidakpastian. Pengunjung dapat mengetahui apa yang harus disiapkan dan alasan pemeriksaan dilakukan. Media informasi memberi konteks bahwa pemeriksaan diterapkan sebagai kewajiban keamanan, bukan perlakuan pribadi. Kejelasan dan konsistensi membantu petugas menjaga komunikasi profesional.

Dalam perspektif organisasi, digitalisasi SOP menciptakan sumber pengetahuan bersama. Petugas merujuk dokumen yang sama dan perubahan dapat dikelola melalui versi yang diperbarui. E-SOP dapat digunakan untuk memperkuat habituasi petugas keamanan (Salsabilla dan Subroto, 2025). Kebiasaan tidak terbentuk hanya dengan menyediakan dokumen. Dibutuhkan pengulangan, teladan atasan, supervisi, umpan balik, dan evaluasi kepatuhan.

Dalam perspektif teknologi, SIGMA menunjukkan bahwa transformasi digital tidak harus dimulai dengan aplikasi kompleks. Perubahan digital berkaitan dengan proses dan organisasi, sedangkan nilai publik berkaitan dengan kemampuan respons. SIGMA menerapkan prinsip tersebut melalui digitalisasi informasi yang langsung berkaitan dengan pekerjaan. Pendekatan bertahap lebih realistis untuk memastikan fitur yang dikembangkan benar-benar dibutuhkan.

Dalam perspektif intelijen masyarakat, data pemeriksaan dapat menjadi masukan untuk mengenali pola risiko, seperti jenis barang yang sering ditolak, waktu kunjungan yang padat, atau titik proses yang membutuhkan pengawasan lebih. Potensi analitik ini belum diwujudkan penuh dalam program KKN. Potensi tersebut dapat menjadi arah pengembangan ketika pencatatan telah konsisten dan tata kelola data memadai.

Program juga memperlihatkan hubungan antara keamanan dan kenyamanan. Pemeriksaan yang jelas, cepat, dan teratur dapat meningkatkan rasa aman sekaligus mengurangi kebingungan. Evaluasi SIGMA sebaiknya melibatkan petugas dan pengunjung agar aspek keamanan, kesopanan, aksesibilitas, dan kelancaran layanan dapat dinilai secara seimbang.

9. Keunggulan, Keterbatasan, dan Rencana Keberlanjutan

Keunggulan SIGMA terletak pada kesederhanaan, relevansi, dan kemampuan diperbarui. Produk disusun berdasarkan observasi langsung, tidak memerlukan investasi teknologi besar, serta menggabungkan pedoman internal dengan media informasi publik. Format digital memungkinkan dokumen disimpan dan disebarkan secara efisien, sedangkan versi cetak tetap dapat digunakan sebagai cadangan. Keterbatasan pertama adalah waktu pelaksanaan yang singkat. Program belum menilai perubahan jumlah temuan barang terlarang, lama layanan, kepuasan pengunjung, atau kepatuhan petugas dalam periode panjang. Keterbatasan kedua adalah evaluasi yang masih deskriptif dan berfokus pada penyelesaian luaran. Keterbatasan ketiga adalah ketergantungan pada komitmen petugas untuk menggunakan versi terbaru. Keterbatasan keempat adalah risiko informasi tidak mutakhir apabila tidak terdapat penanggung jawab pembaruan. Keterbatasan tersebut menentukan cara hasil ditafsirkan. Pernyataan bahwa SIGMA meningkatkan efektivitas harus dipahami sebagai potensi dan kontribusi proses, bukan kesimpulan kausal. Evaluasi lanjutan dapat menggunakan desain sebelum dan sesudah dengan indikator terukur, seperti rata-rata waktu pemeriksaan, jumlah penjelasan ulang, kelengkapan pencatatan, tingkat kesesuaian petugas terhadap SOP, jumlah barang yang ditolak menurut kategori, dan persepsi pengunjung mengenai kejelasan informasi.

Keberlanjutan program membutuhkan penanggung jawab dokumen dan jadwal evaluasi. SOP sebaiknya ditinjau ketika terdapat perubahan kebijakan, jenis layanan, sarana, atau pola risiko. Setiap revisi perlu diberi nomor versi, tanggal berlaku, pihak yang menyetujui, dan catatan perubahan. Media publik harus diperbarui bersamaan dengan SOP agar tidak terdapat informasi yang bertentangan.

Pengembangan lanjutan dapat mencakup formulir pencatatan digital, basis data temuan, rekap kategori barang, pengingat pembaruan, dan dashboard sederhana. Pengembangan harus memperhatikan keamanan data, pembatasan akses, pencadangan, dan kebutuhan audit. Data pribadi pengunjung tidak boleh dikumpulkan melebihi kebutuhan dan harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

SIGMA juga dapat diintegrasikan dengan pelatihan berkala. Skenario simulasi dapat melatih respons petugas terhadap barang yang ditolak, dugaan pelanggaran, pengunjung berkebutuhan khusus, atau antrean padat. Evaluasi pelatihan tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga tindakan, komunikasi, dokumentasi, dan kepatuhan terhadap prinsip penghormatan martabat manusia.

Tabel 4. Keunggulan, Keterbatasan, dan Arah Pengembangan SIGMA

Keunggulan	Keterbatasan	Arah Pengembangan
Berbasiskebutuhan lapangan, sederhana, dan biaya rendah.	Waktu mentasi dan evaluasi terbatas.	Uji sebelum dan sesudah dengan indicator waktu, kepatuhan, dan kualitas dokumentasi.
Mudah diperbarui dan digunakan untuk sosialisasi.	Bergantung pada Pengelolaan versi dan komitmen petugas.	Penanggung jawab, jadwal tinjauan, nomor versi, dan catatan perubahan.
Mendukung keseragaman prosedur dan transparansi layanan.	Akses ngkat atau jaringan dapat menjadi hambatan.	Salinan cetak, akses luring, dan pengamanan data.

KESIMPULAN

Program SIGMA menghasilkan paket inovasi berupa SOP penggeledahan badan dan barang bawaan pengunjung, bagan alur pemeriksaan, media informasi, dan mekanisme akses digital yang disusun berdasarkan kondisi operasional Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai. Enam target luaran program seluruhnya diselesaikan sehingga ketercapaian luaran mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan penyelesaian produk dan tahapan, bukan bukti kausal mengenai penurunan barang terlarang atau peningkatan keamanan jangka panjang. SIGMA memberikan nilai praktis melalui kejelasan prosedur, dukungan terhadap keseragaman tindakan petugas, kemudahan pembaruan dokumen, penguatan informasi bagi pengunjung, serta dasar bagi monitoring dan evaluasi.

Keberlanjutan SIGMA memerlukan penanggung jawab, pengelolaan versi, pembaruan berkala, sosialisasi, supervisi, perlindungan data, serta evaluasi dengan indikator proses dan hasil yang terukur. Pengembangan berikutnya dapat mencakup pencatatan digital dan analisis pola temuan tanpa mengurangi prinsip kesopanan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak pengunjung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai beserta jajaran, mentor, dosen pembimbing, dan petugas layanan kunjungan yang telah memberikan izin, informasi, masukan, fasilitas, serta pendampingan selama observasi, penyusunan, konsultasi, sosialisasi, dan penyempurnaan SIGMA. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aji, F. B., Junaidi, A., & Rudatyo. (2023). Pelaksanaan tugas pengamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. *Jurnal Bevinding*, 1(06), 46-51.
- Asror, I., Indahdewi, L., & Simanjuntak, M. V. (2024). Analisis keberfungsian intelijen pemasyarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *Journal of Correctional Studies*, 1(2).
- Dalaiya, A., & Musdalifah. (2023). Peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kelurahan Manggala melalui penyusunan standar operasional prosedur. *ADMIT: Jurnal Administrasi Terapan*, 1(2), 241-260. <https://doi.org/10.33509/admit.v1i2.2376>
- Eom, S.-J., & Lee, J. (2022). Digital government transformation in turbulent times: Responses, challenges, and future direction. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101690. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101690>
- Fahr, M. C., Förster, M., Moestue, L., Brasse, J., Klier, J., & Klier, M. (2025). Improving the use of public e-services through explainability. *Journal of Business Economics*, 95(4), 553-586. <https://doi.org/10.1007/s11573-024-01212-9>
- Fikia, M., & Subroto, M. (2023). Manajemen strategi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19809>
- Frasetyo, A. E., Julianto, P. D., Muhammad, A., & Biafri, V. S. (2025). Sosialisasi layanan kunjungan tatap muka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. *JPMP: Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekip*, 3(1). <https://doi.org/10.52472/jpmp.v3i1.131>
- Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector: A systematic review and research agenda. *Public Management Review*, 26(7), 1963-1987. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2234917>
- Julia, H., Harun, R. R., & Erwin, Y. (2025). Sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan guna mencegah peredaran barang terlarang. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i3.27498>
- Kurniawan, A. (2023). Peran petugas pintu utama (P2U) sebagai bentuk strategi pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan dari tindak penyelundupan narkoba. *Unizar Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.37>
- Kusuma, R. B. (2025). Meningkatkan efisiensi kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa: Program Trans Barang Kunjungan. *Journal Central Publisher*, 2(2), 1560-1566. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i2.339>
- Ngongo, C. V., Kehi, M. A., Subroto, M., & Indahdewi, L. (2025). Mewujudkan kenyamanan dan keamanan: Inovasi pintu pemeriksaan pengunjung di Lapas Kelas IIB Tuban. *Journal Central Publisher*, 2(11), 2874-2883.
- Peterson, B. E., Kim, K. D., & Shukla, R. (2024). The sociology of contraband: Examining the correlates of illicit drugs, cellphones, and weapons in U.S. prisons. *The Prison Journal*, 104(3). <https://doi.org/10.1177/00328855241240143>
- Rifaldo, M. (2025). Penggunaan sandal kayu untuk pemeriksaan layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. *Journal Central Publisher*, 3(1), 3129-3135. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i1.596>
- Salsabilla, A. T., & Subroto, M. (2025). Optimalisasi implementasi penguatan habituasi petugas keamanan dan penjagaan melalui E-SOP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. *Journal Central Publisher*, 2(10), 2702-2709. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i10.541>

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan.